

PERAN KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN TNI DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN (STUDI DI KOTA BANDUNG)

Cecep R. Mujono*) dan Armaidy Armawi**)

Pertahanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, bagi bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta (Sishanta) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Departemen Pertahanan, 2009).

Pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan didasarkan pada pembinaan untuk kepentingan pertahanan negara sesuai dengan Sishanta, aspek geografi dibina menjadi ruang juang, aspek demografi dibina mejadi alat juang, dan aspek kondisi sosial dibina menjadi kondisi juang. Pertahanan negara bukanlah bidang yang berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan dalam agenda pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pendekatan keamanan (security approach) harus disatukan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Perubahan paradigma konsep sistem pertahanan negara yang semula menekankan pada upaya mempertahankan stabilitas teritorial, kemudian bergeser pada upaya pemberdayaan wilayah. Namun, masih dirasakan bahwa koordinasi dan opera-

sionalisasi konsep tersebut hingga sekarang belum jelas. Demikian pula, dalam pembagian peran antara pemerintah dan TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan juga masih samar-samar. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Daerah cen-

*) Alumni S2 Katahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

**) Dosen Fakultas Filsafat UGM.

derung bersikap menunggu karena urusan militer dianggap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Disisi lain karena dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dinyatakan bahwa TNI membantu pemerintah, ada kecenderungan TNI juga menunggu inisiatif pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi kevakuman dalam koordinasi dan integrasi pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah.

Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan yang perjabarannya didelegasikan ke Komando Kewilayahan (Kowil) yang ada di daerah (Kodam, Korem, Kodim) termasuk Kodim 0618/BS. Pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh TNI AD dalam rangka mendukung tugas pokok TNI di samping membantu pemerintah dalam tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah koordinasi antara pemerintah daerah dengan TNI dalam hal ini Kowil perlu diteliti untuk dicarikan alternatif solusinya. Penelitian ini mengenai koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kowil (Kodim) dengan judul "Peran koordinasi antara Pemerintah Kota dengan TNI dalam Pemberdayaan Wilayah Pemberdayaan Pertahanan.

Koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS

Kelembagaan dan Komitmen Koordinasi

Kelembagaan

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung sejalan dengan isu pelaksanaan pembangunan perkotaan secara nasional, antara lain: (1) belum munculnya pemahaman bersama mengenai orientasi dan paradigma pembangunan perkotaan masa depan; (2) fragmentasi sektoral dan fungsional pelaksanaan pembangunan perkotaan dalam efisiensi maupun efektifitas pelaksanaan manajemen perkotaan; (3) konsekuensinya adalah miskordinasi antar pelaku pembangunan perkotaan di tingkat pusat maupun di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Departemen Pertahanan guna kepentingan pertahanan negara memiliki kewenangan menetapkan kebijakan umum, menetapkan kriteria atau persyaratan dan alokasi kebutuhan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dengan semua pihak terkait (Departemen, Intansi, dan Pemerintah Daerah), mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendayagunaannya. Dengan sejumlah kewenangan tersebut, Departemen Pertahanan memiliki tugas dan fungsi yang tidak mudah, apalagi Departemen Per-

tahanan tidak memiliki kantor wilayah (Kanwil) sebagai ujung tombak di daerah.

Komitmen

Pelaksanaan koordinasi yang bersifat pokok dan strategis dilakukan oleh Walikota Bandung bersama-sama dengan unsur Muspida Kota Bandung serta perangkat daerah yang ada. Bersama dengan para pimpinan wilayah, Walikota Bandung melakukan rapat-rapat atau menyelenggarakan forum Musyawarah Pimpinan Daerah Plus (Muspida Plus), sedangkan dengan perangkat pejabat Kota Bandung dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis.

Rapat Muspida yang dilakukan memiliki beberapa tujuan seperti: (1) mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara berdaya guna dan berhasil guna; (2) mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan kondisi ketertarikan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan keten-

traman dan ketertiban umum; (3) menentukan sistem, prosedur dan mekanisme operasional pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif.

Koordinasi teknis dalam praktiknya dilakukan dalam bentuk koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Di bidang perencanaan, koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota dalam bentuk forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung, secara berperiodik. Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan harus dibangun antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS dalam rangka pembinaan aspek geografi menjadi ruang juang, aspek demografi menjadi alat juang, serta aspek kondisi sosial. Kerja sama dan sinergitas yang urgen dan diprioritaskan untuk dikelola dalam rangka meningkatkan peran Kodim

0618/BS dalam berkontribusi dalam pembangunan Kota Bandung.

Koordinasi Aspek Geografi

Aspek geografi memerlukan pembinaan agar dapat mewujudkan ruang juang yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan segenap potensi sumber kekayaan alam dibina menjadi kekuatan geografi, dalam wujud ruang juang yang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan untuk kepentingan pertahanan. Pada pembahasan ini difokuskan kepada keserasian antara RTRW Kota Bandung dengan RUTR Wilhan Kodim 0618/BS. Dalam konteks pertahanan negara, aspek ruang wilayah memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai ruang juang yaitu bahwa penataan ruang wilayah atau ruang geografis yang diatur dalam tata ruang pada umumnya dan tata ruang pertahanan pada khususnya.

Ruang juang ini dapat dijadikan sebagai ruang manuver dan medan pertahanan untuk mendukung strategi pertahanan yang diwujudkan dalam klasifikasi daerah pangkal perlawanan. Disamping berfungsi sebagai logistik wilayah untuk mendukung strategi pertahanan. Koordinasi Kodim dengan Pemerintah Kota Bandung maupun ins-

tansi terkait untuk penyesuaian RUTR Wilhan dengan RTRW Kota, mengklasifikasikan tata ruang wilayah pertahanan darat menjadi daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakng, dan daerah pangkal perlawanan. Selanjutnya mentransformasikan pembangunan yang ada untuk mewadahi kepentingan pertahanan jika negara dalam keadaan perang. Dengan demikian pemahaman tentang ruang juang dapat diartikan suatu tempat atau wilayah yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung pertahanan negara bila negara menghadapi ancaman atau peperangan.

Koordinasi Aspek Demografi

Aspek demografi agar dapat menjadi kekuatan demografi dalam wujud alat juang yang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan untuk kepentingan pertahanan negara. Sebagai alat juang bahwa segala sumber daya nasional di daerah yang memiliki kapabilitas untuk mendukung sistem pertahanan yang dapat ditinjau dari segi sumber daya manusia (komponen utama, cadangan, dan pendukung), sumber daya alam dan buatan serta sarana prasarana.

Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertahanan semesta belum

ada, di mana dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak ada aturan yang secara implisit mengatur pertahanan semesta, konsekuensinya Pemerintah Kota yang seharusnya turut bertanggung jawab terhadap penyiapan pertahanan semesta tidak menganggap urusan pertahanan menjadi bagian tugasnya. Beranggapan bahwa urusan pertahanan adalah urusan TNI dalam hal ini Kodim 0618/BS.

Dari perspektif pertahanan, Kodim 0618/BS yang berlokasi di Kota Bandung adalah wujud fisik kekuatan TNI dalam kerangka strategi pertahanan yang bercirikan pertahanan kontinental. Asumsinya pada skenario terburuk, saat pertahanan gagal membendung musuh, TNI bersama rakyat harus melakukan perlawanan terakhir. Dalam perspektif pemberdayaan wilayah pertahanan, Kodim 0618/BS merupakan bentuk gelar kekuatan yang didasarkan atas pilihan strategi pertahanan yang diputuskan otoritas politik karena strategi pertahanan menyangkut penilaian ihwal ancaman dan cara mengatasi ancaman tersebut dengan konsekuensi penge-
rahan sumber daya pertahanan yang harus diputuskan pemimpin politik yang memperoleh mandat rakyat.

Kodim 0618/BS dalam mem-

bantu Pemerintah Kota Bandung melakukan pembinaan terhadap aspek demografi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi kekuatan rakyat yang tergabung sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang pengabdian-nya dilaksanakan sesuai dengan profesinya. Dikaitkan dengan konsep pemberdayaan wilayah pertahanan, maka menjadi tugas Kodim 0618/BS untuk membantu Pemerintah Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara agar dapat diberdayakan menjadi komponen cadangan dan pendukung.

Koordinasi Aspek Kondisi Sosial

Aspek kondisi sosial dibina agar menjadi kekuatan pertahanan dalam wujud kondisi juang yang tangguh sehingga memiliki daya tangkal kewilayahan yang kuat dan mampu mendukung kepentingan pertahanan negara. Aspek kondisi sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Peran Kodim 0618/BS dalam pemberdayaan wilayah pertahanan aspek kondisi sosial adalah menyelenggarakan Binter dengan menggunakan metode Bhakti TNI, Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil), dan Komunikasi

Sosial (Komsos).

Implementasi dari koordinasi antara Pemerintah Kota dan Kodim 0618/BS dalam upaya turut berperan serta dalam memajukan kondisi ekonomi dan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan melalui metode Bhakti TNI adalah dengan digelarnya program TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) di mana telah diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Untuk tahun 2008 dilaksanakan di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Tahun 2009 digelar di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul, dari kegiatan tersebut dimaksudkan tentang peran dan konsistensi TNI dalam program TMMK, merupakan wujud kepedulian terhadap dinamika pembangunan. Sementara untuk tahun 2010 dilaksanakan di wilayah Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dengan sasaran fisik dan non fisik. TMMK adalah kelanjutan dari program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa, bersama-sama dengan program lainnya seperti TMKK, Bulan Bhakti KB Siliwangi (TMKK) dan kegiatan Kali Bersih yang secara rutin dan terprogram. Penyelenggaraan TMMK dilaksanakan bersama oleh Tim Pokjanal Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No.

323.1/Kep.237-BKPPM/2010 tentang pembentukan Pokjanal TMMK Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok menatapkan pelaksanaan, meningkatkan, dan mengendalikan program TMMK dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 tentang mekanisme pengendalian program masuk desa. Ditunjuk sebagai Ketua Tim Pokjanal adalah Kepala BKPPM Kota Bandung.

Selanjutnya kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Kodim 0618/BS bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung adalah dengan menggelar Penataran Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) di lingkungan pekerjaan untuk Aparat Baidiklat, BPLK, dan Karyawan Perusahaan setiap triwulan untuk sejumlah 50 orang. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Kodim 0618/BS yang melibatkan masyarakat di Kota Bandung adalah dengan menggelar Karya Bhakti Cikapundung Bersih. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah melaksanakan pembersihan aliran sungai dari sampah dan rumput yang berada di sepanjang aliran sungai Cikapundung dan menggugah kesadaran warga sekitar untuk senantiasa memelihara keindahan dan kebersihan sungai Cikapundung sehingga bisa dijadikan obyek

wisata. Peserta kegiatan terdiri atas unsur TNI, Polri, OKP, Ormas, dan masyarakat.

Kendala Koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS

Perbedaan Paham Koordinasi

(Fayol, 1949) membedakan fungsi manajemen atau lebih tepat lagi dikatakan administrasi dalam fungsi *planning organizing, command, coordination, dan control*. Dalam membicarakan koordinasi sebagai tugas mengharmoniskan aktivitas untuk menjamin sukses, Fayol menghadapi kesulitan untuk membedakan dan memisahkan dengan jelas fungsi ini dari *command* atau bahkan dari *organizing, dan planning*. Namun demikian tidak ada yang menyangkal bahwa betapa pentingnya koordinasi dan tanggung jawab manajer untuk menciptakan keharmonisan dalam organisasi. Keharmonisan dalam koordinasi digambarkan oleh (Suryaningrat, 1989:112) dengan sejumlah anak-anak yang balap lari berkelompok dengan kaki mereka diikat bersama, semua kaki kanan diikat tali satu sama lain, demikian pula semua kaki-kiri.

Hubungan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota dan TNI di Kota Bandung dalam konteks pertahanan-keamanan dan aktifitasnya perlu

diperjelas tentang latar belakangnya Setidaknya ada dua alasan mengapa hubungan keduanya dapat berjalan dan saling menguntungkan, yakni: (1) Pemerintah Kota sebagai pemegang otoritas tertinggi di Kota Bandung memiliki wewenang untuk menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pajak, dan pendapat lainnya; (2) Pemerintah Kota membutuhkan jaminan pertahanan dan keamanan di Kota Bandung, sehingga melakukan barter agar kedua institusi tersebut berkomitmen menjaga daerahnya agar tetap kondusif.

Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang mengemuka mengapa pelaksanaan koordinasi di Kota Bandung antara Pemerintah Kota dan Kodim terhambat: (1) asumsi dasar bawah masalah pertahanan dan keamanan merupakan wewenang pemerintah pusat; (2) adanya gap pemahaman mengenai interpretasi terhadap berbagai perundang-undangan; (3) dinamika otonomi daerah yang banyak menyita dan mengkoncentrasikan perhatian hanya pada isu-isu otonomi daerah; (4) budaya politik yang berkembang di daerah terhadap eksistensi TNI, khususnya dalam bentuk Kowil dulu Koter menyisakan duka lama dimana masih beranggapan dominasi militer; dan

(5) paradigmatik kultur perbedaan sipil dan militer dalam hal kepatuhan dan disiplin.

Faktor Deteminan Kendala Koordinasi

Kendala Koordinasi Aspek Geografi

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandung dengan mempertimbangkan visi, misi dan arah pembangunan kota serta isu strategis adalah mewujudkan tata ruang kota yang efisien, berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan umum menuju Kota Bandung yang "Bermartabat" (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat. Pada Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung menyebutkan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pertahanan keamanan adalah mengamankan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan dan keamanan yang ada serta mengamankan kawasan dan bangunan instalasi dan perkantoran pertahanan dan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan keamanan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam RTRW Kota Bandung hanya mencakup perkantoran dan perumahan militer, namun belum membahas tentang kawasan pertahanan dan keamanan dalam upaya pertahanan negara di daerah.

Dalam praktiknya setelah dilakukan penelitian di lapangan, didapati adanya ketidaksesuaian sejumlah dokumen RUTR Wilhan Kodim dengan RTRW Kota Bandung, misalnya dalam RUTR Wilhan Kodim 0618/BS TA. 2009 pada umumnya wilayah Kecamatan Sukasari, Cidadap, Coblong, Cibeunying Kaler, Ujungberung, Antapani, dan Mandalajati digolongkan sebagai daerah pertempuran. Sementara dalam Perda No. 2 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung, di beberapa tempat tersebut terdapat perumahan, bangunan industri atau obyek vital. Mengingat konsep pertahanan untuk wilayah Kodim 0618/BS pada daerah-daerah tersebut diproyeksikan sebagai daerah pertempuran yang disiapkan sebagai tempat menghadapi ancaman invasi musuh atau tempat kontak senjata dengan musuh, maka di tempat tersebut seyogyanya tidak ada (tidak dibangun) bangunan vital, karena akan menjadi sasaran penghancuran. Atau kalau pun sudah terlanjur dibangun obyek vital, maka perlu dirumuskan strategi pertahanan di wilayah tempat obyek-obyek vital tersebut berada (Mariana, 2006). Juga termasuk di daerah Punclut yang dijadikan ruang terbuka hijau dalam RTRW Kota Bandung dan masuk dalam klasifikasi daerah per-

tempuran dalam RUTR Wilhan Kodim telah banyak berdiri bangunan perumahan.

Menyangkut kendala dalam sistem dan metode penyusunan RUTR Wilhan Kodim 0618/BS dan RTRW Kota Bandung: (1) mekanisme, prosedur dan tata laksananya belum jelas dan tidak mantap terbangun diantara keduanya; (2) terkesan ada kendala psikologis akibat dua pendekatan yang seolah-olah bertentangan dalam penyusunan rencana tata ruang tersebut, yakni pendekatan kesejahteraan dan pertahanan keamanan; dan (3) menyangkut masalah sumber daya manusia (SDM). Akibatnya RUTR Wilhan Kodim dinilai kurang *intuitive* dan tidak ilmiah, karena aspek metodologi ilmiah yang digunakan dalam penyusunannya masih kurang.

Kendala Koordinasi Aspek Demografi

Dalam memberdayakan kekuatan pendukung mengandung unsur demografi aspek kehidupan berupa kondisi sosial yakni manusia atau penduduk dibina, dikelola dan didayagunakan sebagai kekuatan pertahanan dalam bentuk alat juang yang tangguh yang dapat disusun sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Masih dijumpai beberapa kendala antara lain: (1) kurangnya res-

pon pemerintah daerah terhadap pemberdayaan wilayah pertahanan; (2) masih lemahnya kesadaran bela negara di kalangan masyarakat terutama kaum muda; (3) masalah pertahanan dan keamanan dipandang seolah barang asing; (4) secara kuantitatif masih kurang pakar sipil yang mendalami masalah pertahanan dan keamanan; dan (5) belum tuntasnya pembahasan RUU tentang Keamanan Nasional dan RUU tentang Komponen Cadangan sebagai pedoman bagi semua institusi yang ada maupun semua komponen bangsa, sehingga seolah-olah masalah keamanan nasional belum mendesak untuk diundangkan. Oleh karenanya muncul persepsi di kalangan masyarakat masalah tentang pertahanan negara semata-mata merupakan urusan dan hanya untuk kepentingan institusi TNI saja.

Karena RUU Komponen Cadangan belum selesai dalam pembahasannya maka masih digunakan UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa rakyat terlatih dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara, membantu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa, dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Implementasi kendala koordinasi dalam aspek demografi di Kota Bandung khususnya tentang penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung adalah masalah kelembagaan dan belum adanya aturan yang mengikat sejalan dengan belum tuntasnya pembahasan RUU tentang komponen cadangan dan komponen pendukung. Sehingga pemberdayaan komponen cadangan di Kota Bandung belum terkoordinir dengan baik. Selain itu khusus untuk SDM sebagai komponen pendukung pun belum mendapatkan perhatian yang cukup. Belum adanya koridor, rambu-rambu, dan peluang bagi tiap-tiap komponen pendukung tentang kontribusi yang dapat diberikan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Kendala Koordinasi Aspek Kondisi Sosial

Kendala aspek kondisi sosial bangsa di Kota Bandung sangat terpengaruh dengan kondisi aspek kondisi sosial secara nasional di Indonesia pada umumnya yang tidak luput dari permasalahan. Kecenderungan menujunya rasa nasionalisme dan keindonesiaan dapat dilihat dari

indikator-indikator yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan warga masyarakat ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.

Implementasi kendala dalam aspek kondisi sosial di Kota Bandung, yang merupakan daerah penelitian tidak membahas semua bidang dari aspek kondisi sosial, namun lebih difokuskan pada kehidupan masyarakat di Kota Bandung tentang kondisi ekonomi dan sosial budaya. Hal tersebut yang menjadi fokus koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS dalam penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan. Kendala koordinasi dari implementasi koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS meliputi dua kendala yakni masalah daya dukung masyarakat dan masalah pendanaan/anggaran dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Kodim 0618/BS dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Upaya Peningkatan Koordinasi

Struktur Organisasi

Pelaksanaan koordinasi dalam proses kegiatan perencanaan

dan pengendalian pemberdayaan wilayah pertahanan, diperlukan penyempurnaan organisasi yang disusun secara terpadu antara aparat Pemerintah Kota Bandung dan Kodim 0618/BS dibantu dengan instansi terkait, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Koordinasi

Tanggungjawab dalam melaksanakan koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerja sama. Oleh karena itu, maka kerja sama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. Antara Kodim 0618/BS dengan Pemerintah Kota Bandung harus melaksanakan koordinasi horizontal agar terjalin kesatuan tindakan. Saling pengertian dan kebersamaan tersebut memerlukan adanya koordinasi, kesetaraan, dan kerja sama yang solid dalam menyusun dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan antara Kodim 0618/BS dengan Pemerintah Kota, LSM, tokoh-tokoh politik, agama, dan masyarakat, serta kom-

ponen bangsa lainnya di Kota Bandung. Dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan upaya koordinasi antar individu (pimpinan) maupun kelompok (staf) yang tidak bisa dibatasi oleh struktur organisasi yang cenderung berbentuk piramida saja.

Program Kerja

Membuat program kerja tentang pemberdayaan wilayah pertahanan meliputi program kerja penyiapan potensi nasional di daerah menjadi kekuatan pertahanan dengan kesesuaian antara RUTR Wilhan Kodim dengan RTRW Kota Bandung, program kerja penyiapan komponen cadangan dan pendukung, dan program kerja tentang peman-tapan keterpaduan langkah tindakan bagi TNI, aparat pemerintah serta pemberdayaan masyarakat. Program kerja harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi dimensi, tidak hanya mementingkan kerangka teknis dan kelayakan administratif. Program kerja harus memilih strategi yang tepat untuk dapat tercapainya tujuan koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang menyentuh kehidupan masyarakat di pinggiran Kota Bandung.

Langkah-langkah program kerja koordinasi dapat diatur sebagai berikut: (1) membangun keinginan untuk berkoordinasi yang sebaiknya didahului oleh pelaku koordinasi (*actor*); (2) menyusun rencana kegiatan yang mengacu program kerja yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS; (3) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan baik secara operasional maupun administrasi; (4) menyiapkan kemampuan tenaga pelaksana agar memiliki keterampilan sesuai bidang tugas yang akan dikerjakan; (5) melaksanakan aksi di lapangan dari berbagai kegiatan yang telah disepakati bersama; dan (6) melaksanakan pengawasan dan evaluasi guna keberhasilan program kerja yang akan datang.

Sosialisasi

Perlunya dilakukan sosialisasi program kerja pemberdayaan wilayah pertahanan kepada seluruh komponen masyarakat untuk menghilangkan persepsi yang salah terhadap tugas dan peran Kodim 0618/BS dalam membantu Pemerintah Kota Bandung dalam penyiapan pertahanan negara. Sosialisasi tentang sistem pertahanan negara, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menimbulkan kesadaran dan partisipasi masya-

rakat. Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan melalui forum seminar, diskusi, dan informasi melalui media cetak dan elektronik.

Konsepsi Model Koordinasi

Kebijakan Koordinasi

1) Kebijakan aspek geografi, penyelarasan penyusunan RUTR Wilhan Kodim dengan RTRW Kota Bandung yang menyeimbangkan pendekatan kepentingan kesejahteraan dan pertahanan keamanan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan. 2) Kebijakan aspek demografi, penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung yang dapat diberdayakan dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan. 3) Kebijakan aspek kondisi sosial, mengimplementasikan program kegiatan yang menyentuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kota Bandung dan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan.

Strategi Koordinasi

Strategi Koordinasi Aspek Geografi

Pemberdayaan Sistem

Semua pemangku kepentingan memberi masukan tentang penjabaran UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

sehingga lebih mencerminkan asas keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan pertahanan. Secara khusus Departemen Pertahanan perlu dideesak untuk segera menuntaskan pembahasan penyusunan RUTR Wilhan Nasional yang menjadi pedoman bagi RUTR Wilhan Kodam, Korem, dan Kodim. Dalam pelaksanaannya, diberi ruang bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah pertahanan berdasarkan prinsip kebersamaan, keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Dengan demikian RUTR Wilhan pada dasarnya tidak bersifat rahasia dan dapat diakses masyarakat juga termasuk pemangku kepentingan.

Penguatan Struktur Kelembagaan

RUTR Wilhan Kodim seharusnya bersifat terbuka bagi kemungkinan penggunaan jasa konsultan perencanaan di bidang pertahanan seperti halnya jajaran Pemerintah Kota. Kodim harus mulai melibatkan unsur-unsur terkait di jajaran TNI AD, salah satunya yang dapat diberdayakan untuk bekerja sama adalah Topdam yang sejatinya memiliki kemampuan dan sumberdaya yang memadai. Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan TNI mene-

tapkan pedoman dan standar yang digunakan dalam penyusunan RUTR Wilhan dan RTRW Pemda. Kemudian Kodam dan Korem melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang lingkup kepentingan Kodim dalam penyusunan RUTR Wilhan, baik ke dalam maupun ke luar guna meluruskan pemahaman yang selama ini kurang tepat. Yang tidak kalah pentingnya, Kodim dan Pemerintah Kota Bandung harus lebih meningkatkan kualitas koordinasi dan hubungan kerja guna mengikis kentalnya semangat egoisme sektoral dalam penyusunan tata ruang masing-masing.

Peningkatan Kualitas SDM

Strategi yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas SDM adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan frekuensi pengiriman SDM (prajurit dan PNS) guna mengikuti pendidikan lanjutan di bidang perencanaan dan manajemen pertahanan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan iptek; (2) perlunya diberikan pembekalan dan penataran bagi jajaran Kodim tentang yang terkait dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah guna kepentingan pertahanan negara; (3) aspek kompetensi teknis patut menjadi

perhatian guna mendukung penyusunan RUTR Wilhan yang memenuhi persyaratan ilmiah; (4) melakukan penataan kembali pengaturan yang terkait dengan manajemen personel; (5) menerapkan pembinaan personel secara tegas, jelas, dan konsisten.

Strategi Koordinasi Aspek Demografi

Sasaran pada aspek demografi yang ingin dicapai sesuai dengan tingkatan dan tataran kewenangan Kodim 0618/BS adalah melaksanakan pendataan terhadap potensi sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk disiapkan dan dibina menjadi kekuatan pertahanan negara sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan bukan wajib militer, tetapi intinya adalah wajib bagi warga negara yang telah mempunyai pekerjaan tetap (pegawai negeri/swasta) yang memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mengikuti "latihan dasar kemiliteran" selama 30 hari. Kemudian kembali ke profesinya semula sebagai masyarakat sipil. Penggunaan komponen cadangan hanya untuk menghadapi ancaman militer melalui keputusan "mobilisasi" yang ditetapkan

oleh Presiden dengan persetujuan DPR dengan memperhitungkan eskalasi tingkat ancaman yang dihadapi. Selanjutnya dalam perekrutan komponen pendukung tidak memuat substansi untuk membentuk kekuatan nyata yang dapat dimobilisasi menghadapi ancaman dalam perlawanan bersenjata secara fisik. Komponen pendukung pada prinsipnya adalah elemen-elemen sumber daya nasional ditata dalam lima segmen yaitu: (1) para militer; (2) tenaga ahli/profesi; (3) industri strategis; (4) SDA/SDB; dan (5) sarana prasarana nasional serta semua warga negara sebagai individu maupun sebagai anggota organisasi masyarakat. Pada saat "mobilisasi", komponen pendukung bersifat non kombatan.

Strategi koordinasi dalam membantu penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung di Kota Bandung yang dapat dilakukan meliputi empat strategi: (1) penyiapan sumber daya manusia, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota. Penyiapannya dimulai dari tingkat Koramil dan Kecamatan, di mana Kodim berperan membantu dalam perekrutan, pendataan, pelatihan, dan pemeliharaan kemampuan; (2) penyiapan rakyat terlatih yang dibina oleh masing-masing pembina yang berada di

wilayah Kota Bandung meliputi Ratih Wanra disiapkan oleh setiap Babinsa 5 orang, setiap Koramil 50 orang, dan di Kodim 200 orang. Ratih Kamra disiapkan oleh setiap Polsek 50 orang, dan di Polrestabes 200 orang. Ratih Linmas disiapkan oleh Pemerintah Kota dimana di setiap Rukun Warga (RW) 10 orang, Kelurahan 30 orang, Kecamatan 50 orang sampai mencapai target 15.000 orang. Ratih Tibum disiapkan oleh Pemerintah Kota di setiap Kecamatan 10 orang dan di Kota 50 orang; (3) penyiapan sumber daya alam dan buatan, dilakukan pendataan dan menginformasikan serta mengkoordinasikan dengan pihak/instansi terkait dalam penataan bangunan-bangunan yang dapat digunakan dalam pertahanan, SDA bidang peternakan dan perikanan, SDA bidang pertanian dan perkebunan, SDB bidang industri dasar, dan perbukitan serta hutan-hutan yang dapat digunakan menjadi kantong-kantong pertahanan; (4) penyiapan sarana dan prasarana, dilakukan pendataan dan menginformasikan serta mengkoordinasikan dengan pihak/instansi terkait tentang sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara meliputi pelabuhan udara dan alat angkutan

udara, jaring jalan kelas I,II, dan III, jaring rel kereta api, fasharkan/bengkel-bengkel, instalasi komunikasi, instalasi listrik, industri-industri strategis, rumah sakit tipe 1A, 2B, dan 3C, serta depo-depo logistik.

Strategi Koordinasi Aspek Kondisi Sosial

Pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan oleh Kodim 0618/BS memerlukan sinergi yang mulus dengan program-program Pemerintah Kota Bandung hingga ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Camat dan Lurah bekerja sama dengan Danramil serta Babinsa akan menjadi instrumental penting, karena merekalah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada tataran akar rumput.

Implementasi koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS dalam penyiapan aspek kondisi sosial yang menyentuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kota Bandung. Bagi Kodim merupakan aktualisasi dari salah satu metode dalam Binter yaitu Bhakti TNI, yang diwujudkan dengan menggelar kegiatan "Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa" yang meliputi kegiatan TMMK, Bulan Bhakti KB Siliwangi, dan program Kali Bersih. Dalam pelaksanaannya kerja

sama yang dilakukan adalah Kodim sebagai fasilitator dan motivator, Pemerintah Kota memberikan stimulus dana/anggaran, dan masyarakat yang memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan serta adanya peran serta dan swadaya masyarakat. Melalui program aplikatif tersebut dapat dilakukan percepatan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah pemekaran eks Kabupaten yang bergabung ke Kota Bandung.

Strategi guna peningkatan aspek kondisi sosial meliputi bidang ekonomi dan sosial dalam implementasi kegiatan bersama antara Pemerintah Kota Bandung dan Kodim 0618/BS meliputi dua strategi: (1) strategi pemberdayaan daya dukung masyarakat; dan (2) strategi solusi penganggaran kegiatan. Strategi pemberdayaan daya dukung masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah: (1) sosialisasi kegiatan jauh sebelum pelaksanaan; (2) perlunya keterbukaan dalam penganggaran; (3) menggunakan hari-hari libur; dan (4) perlu dilakukan pelatihan kader.

Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan dana/anggaran dalam penyelenggaraan TMMK, hal ini dapat dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Strategi pendanaan yang dilakukan oleh Pe-

merintah Kota Bandung dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Bandung, adalah melalui dibentuknya Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) yang diketuai oleh Kepala BKPPM.

Mengingat Kodim merupakan instansi pusat yang berada di daerah dasar anggaran menggunakan APBN, sedangkan Pemerintah Kota merupakan instansi otonom dasar anggaran pembangunan adalah APBD. Melalui pembentukan Tim Pokjanal adalah solusi agar Kodim tidak menerima langsung dana APBD untuk kepentingan pemberdayaan wilayah pertahanan. Inisiatif Pemerintah Kota Bandung merupakan kontribusi besar untuk mewujudkan wilayah pertahanan yang komprehensif sesuai dengan harapan.

Kesimpulan

Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara diwujudkan melalui Sishanta yang dipersiapkan oleh pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Pertahanan negara bukanlah

bidang yang berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan dalam agenda pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pendekatan keamanan (*security approach*) harus disatukan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Dalam mengakselerasi konsep sistem pertahanan negara diperlukan pemberdayaan wilayah pertahanan namun masih terjadi kurang sinkronisasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS. Masalah tersebut timbul akibat kurangnya peran koordinasi antara Pemerintah Kota dan TNI. Memang tidak mudah untuk melaksanakan koordinasi guna memberdayakan wilayah pertahanan agar terjadi sinkronisasi yang lebih baik. Dijumpai beberapa kendala koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kodim 0618/BS antara lain: (1) Belum adanya keserasiaan antara RTRW Kota dengan RUTR Wilhan Kodim, khususnya sinkronisasi fungsi kawasan dan klasifikasi daerah pertahanan; (2) Belum diberdayakannya sumber daya manusia yang disiapkan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung; (3) Terkendalanya kegiatan Bhakti TNI karena terbatasnya anggaran untuk membantu ekonomi dan sosial masyarakat Kota Ban-

dung.

Tugas Kodim 061818/BS sebagai bagian dari satuan TNI AD dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Disisi lain dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab pembangunan wilayah otonom yang meliputi geografi, demografi, dan kondisi sosial. Oleh karenanya diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara Kodim 0618/BS dengan Pemerintah Kota Bandung, sehingga dapat mewujudkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan.

Guna membangun peran koordinasi antara Kodim 0618/BS dengan Pemerintah Kota Bandung dihadapkan dengan berbagai kendala koordinasi perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan melalui: (1) penyempurnaan struktur organisasi; (2) melaksanakan koordinasi; (3) penyusunan program kerja tentang pemberdayaan wilayah pertahanan; dan (4) menyelenggarakan sosialisasi. Selanjutnya penerapan konsep model koordinasi, yang didahului dengan adanya kebijakan aspek geografi, demografi, dan kondisi juang. Kemudian dilakukan dengan penerapan strategi aspek geografi tentang kesesuaian antara RUTR

Wilhan Kodim dengan RTRW Kota melalui: (1) pemberdayaan sistem; (2) penguatan struktur kelembagaan; dan (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penerapan strategi aspek demografi tentang penyiapan komponen cadangan dan pendukung melalui: (1) penyiapan sumber daya manusia untuk disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung; (2) penyiapan Ratih; (3) penyiapan sumber daya alam dan sumber daya buatan; dan (4) penyiapan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk penerapan strategi aspek kondisi sosial dalam percepatan pembangunan ekonomi dan sosial melalui: (1) pemberdayaan daya dukung masyarakat; dan (2) solusi penganggaran kegiatan. Bahwa peran koordinasi antara TNI dan Pemerintah Daerah perlu terus ditumbuhkembangkan dalam menghadapi pembangunan, sehingga masyarakat memiliki rasa keamanan dan di lain pihak masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya sebagai prasyarat terwujudnya ketahanan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baron, Robert A. and Donn Byrne, 2004, *Psikologi Sosial*, Edisi Kesepuluh, Erlangga, Jakarta.
- Biddle, BJ and Thomas, EJ, 1966, *Role Theory: Concepts and research*, John Wiley & Sons, New York.
- Craig, G and M. Mayo, 1995, *Community Participation and Empowerment: The Human face of Structural Adjustment or Tools for Demoratic Transformation in* Craig, G & Mayo, M (ed.) 1995, *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*. Zed Books, London.
- Datta, Frans Umbu, 2009, *Seminar Nasional Binter, Pembinaan Teritorial sebagai Instrumen Strategis Pemberdayaan Wilayah Pertahanan untuk Mewujudkan Pertahanan Negara yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan*, Bali.
- Departemen Pertahanan, Ditjen Pothan, 2009, *Kebijakan Ditjen Pothan Departemen Pertahanan: Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan TA. 2009*, Jakarta.
- Fayol, H, 1949, *General of Industrial Administration*, Steples Press, Limited, London.
- Goffman, Erving, 1959, *Presentation of Self in Everiday Life*, Doubleday Anchor Books Doubleday & Company, Inc. Carden City, New York.

- Handyaningrat, Soewarno, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Cetakan Kesepuluh, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P, 2007, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hikmat, Harry, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Cetakan Ke-2, hal. 3, Bandung.
- Ife, Jim, 1995, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Longman, Australia.
- Mahfud, M.D, Mohammad, 2001, *Sistem Pertahanan-Keselamatan dalam Perspektif Indonesia Baru; Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem* (Editor: Indria Samego), The Habibie Centre, Jakarta.
- Mariana, Dede, 2006, *Sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan*, Jurnal Governance, Pusat Penelitian Kebijakan Publik Dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Moekijat, 1994, *Koordinasi ; Suatu Tinjauan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung.
- Perkasad, Mabasad, 2009, *Bujlak tentang Pedoman Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Aspek Darat*, PP: OPS-11.07, Jakarta.
- Purnomo, Agustadi, Sasongko, 2009, *Keynote Speech*, Kepala Staf Angkatan Darat pada Seminar Nasional Binter di Bali.
- Rappaport, J, 1984, *Studies in Empowerment: Introduction to the Issue, Prevention In Human Issue*, USA.
- Robert, Adam, 1986, *Nation in Arms, the theory and practice of territorial defence*.
- Sarbin, TR & Allen, VL, 1968, *Peran teori*. Dalam Lindzey G. & E. Aronson (Eds.), *Handbook of psikologi sosial* (2nd Ed.) (Vol. 1, hal 488-567), Reading, MA: Addison-Wesley.
- Spradley, James, 1980, *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sugandha, Dann, 1991, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Cetakan Kedua, Intermedia, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan-STKS, Bandung.

- _____, 1998, *Human Development Strategy: The Quest for Paradigmatic and Pragmatic Intervention for the Urban Informal Sector*. Working Paper No. 98/2, Massey University, Palmerston North.
- Suryaningrat, Bayu, 1989, *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Terry, George R and Stephen G. Franklin, 1982, *Principles of Management*, Eight Edition, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illinois.
- Terry, George R, 1964, *Principles of Management*: Richard D. Irwin Inc. Homewood, Illinois, USA.
- Tosi, Henry L and Stehen J. Carol, 1982, *Management*, Second Edition, John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto.
- Tripathi, PC and PN Reddy, 1983, *Principles of Management*, Tata Mc Graw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli.